

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

ARTIKEL PENELITIAN

**OLEH:
URAY PERIMA MAHARANI
NIM : F31110043**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2014**

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR PADA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

ARTIKEL PENELITIAN

URAY PERIMA MAHARANI
NIM : F31110043

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Des. H. Parijo, M.Si
NIP. 195308181987031002



Drs. Rum Rosvid, MM
NIP. 196609141990021002

Mengetahui,

Dekan FKIP

Ketua Jurusan P.JPS



Dr. Aswandi
NIP.195805131986031002



Drs. H. Parijo, M.Si
NIP. 195308181987031002

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PARKIR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Uray Perima Maharani, Parijo, Rum Rosvid

Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Untan

Email : uray_perima@yahoo.co.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak parkir, kendala yang dihadapi, upaya peningkatan pajak serta kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dan lembar catatan. Hasil yang diperoleh adalah kontribusi pajak parkir pada tahun 2007 sebesar 0,9%, pada tahun 2008 sebesar 1,13%, pada tahun 2009 sebesar 1,07%, pada tahun 2010 sebesar 1,17%, pada tahun 2011 sebesar 0,849%, pada tahun 2012 sebesar 0,803%, pada tahun 2013 sebesar 0,688% (masih dalam proses).

Kata Kunci : Pajak, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

Abstract : The study aims to determine the parking tax collection system, obstacles encountered, as well as efforts to increase taxes on the parking tax revenue contribution Pontianak. The research method used is descriptive method, the form of research is a case study. The data collection technique used was direct communication techniques and techniques of documentary studies, while the data collection tool used as interview guides and record sheets. Result obtained are parking tax contribution in 2007 valued at 0,9%, in 2008 worth of 1,13%, in the year 2009 amounting to 1,07%, in 2010 worth of 1,17%, in 2011 worth of 0,849%, the amounting to 0,803% in 2012, and in 2013 valued at 0,688% (still in process)

Keywords : Tax, Regional Tax, Real District Income

Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk kepentingan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Pembiayaan pembangunan yang di dapat dari pajak merupakan sumber penerimaan Negara maupun daerah yang digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada masa sekarang ini telah ditetapkan sistem otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, dalam upaya pengembangan daerah harus dicari sumber-sumber keuangan daerah melalui penerimaan daerah berupa pajak daerah maupun retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 dikatakan bahwa, sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana perimbangan dan; (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah, termasuk kota Pontianak. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menggali dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien untuk pembiayaan pembangunan daerah kota Pontianak. Dengan demikian PAD kota Pontianak merupakan hal penting dari daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (10), dikatakan bahwa, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu jenis-jenis pajak daerah merupakan pendapatan daerah harus dipungut berdasarkan sistem dan peraturan yang berlaku. Adapun jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Potensi pajak yang ada di kota Pontianak sangat besar, salah satunya adalah potensi penerimaan pajak parkir. Parkir yang pada awalnya adalah retribusi kemudian dijadikan sebagai pajak dikarenakan potensi parkir pada beberapa area di kota Pontianak ini sudah cukup memadai. Perkembangan pembangunan kota Pontianak yang sangat pesat dewasa ini menyebabkan semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor, yang membawa konsekuensi salah satunya pada keberadaan lahan parkir sebagai fasilitas yang amat diperlukan warga kota Pontianak. Mengingat potensi pajak parkir di Pontianak ini cukup besar, termasuk area yang tidak tergarap secara optimal dan yang belum masuk pendapatan daerah, maka penerimaan pajak parkir di kota Pontianak harusnya memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD kota Pontianak.

Dengan banyaknya jumlah wajib pajak parkir yang ada, penerimaan pajak parkir diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan PAD Pontianak. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan

kepada masyarakat. Berikut ini disajikan jumlah realisasi penerimaan Pajak Parkir dan realisasi penerimaan PAD Kota Pontianak.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah
Kota Pontianak
Tahun 2007 s/d 2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD
2007	Rp. 524.572.950,00	Rp. 57.873.969.632,17
2008	Rp. 726.899.180,00	Rp. 64.207.342.982,53
2009	Rp. 705.050.740,00	Rp. 65.847.727.764
2010	Rp. 1.023.765.490,00	Rp. 87.368.133.213,70
2011	Rp. 1.283.287.000,00	Rp. 151.139.421.278,94
2012	Rp. 1.677.092.788,00	Rp. 208.628.660.840,82
2013	Rp. 1.826.608.122,00	Rp. 265.271.762.000
		(Masih dalam Proses)

Data Olahan 2014

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peran pajak sangat besar bagi kelangsungan hidup perekonomian dan pembangunan bangsa. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat hukum yang mengatur proses penarikan pajak dari pemerintah untuk rakyat. Menurut Marihot P. Siahaan (2013;7) mengatakan “Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi:

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara,

Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, Negara Indonesia dibagi menjadi beberapa Provinsi. Daerah Provinsi tersebut terdiri atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri termasuk mengurus keuangan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul serta dipenuhi oleh setiap rakyat yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana akan diatur dalam bentuk undang-undang, untuk membiayai penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik dalam bentuk pelaksanaan jalannya administrasi

pemerintahan yang dijalankan oleh setiap aparat pemerintahan maupun untuk pelaksanaan jalannya pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku pada setiap daerah. Oleh karena itu pajak daerah merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini dapat terwujud apabila pajak daerah dapat ditingkatkan pemungutannya. Menurut Panca Kurniawan dan Agus Purwanto (2004:47) “pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD”.

Untuk jenis pajak daerah yang ada di Kota Pontianak terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Khusus untuk daerah kabupaten/kota selain kesebelas jenis pajak daerah yang dapat dikutip oleh masing-masing daerah kabupaten/kota tersebut, masih memiliki kemungkinan untuk dapat mengutip sumber perpajakan daerah ini diluar dari ketentuan pajak daerah sebagaimana disebutkan diatas, asal saja pengutipan pajak daerah itu tetap akan diatur dalam bentuk peraturan daerah dari masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, dengan harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) bersifat pajak dan bukan retribusi; (2) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; (3) potensinya memadai; (4) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif; (5) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; (6) menjaga kelestarian lingkungan.

Jika suatu jenis pajak tidak mampu memenuhi kriteria di atas, maka pemerintah tidak dapat memungut pajak kepada masyarakat. Oleh sebab itu, objek atau jenis pajak daerah pada dasarnya sama pada semua daerah, kecuali objek retribusi yang biasa tergantung pada banyaknya pelayanan yang diberikan pada masyarakat.

Sistem pemungutan pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara:

self assessment system, yakni wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri dan diwajibkan melaporkan pajak yang terutang.

official assessment system, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak,

with holding system, yakni sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir merupakan salah satu kontributor yang dapat meningkatkan PAD bila dikelola dengan baik. Penerimaan dari sub sektor perparkiran dalam PAD dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Dalam UU

No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, "Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor."

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pada pajak parkir, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Sumber utama dari pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Menurut Mardiasmo (2004:132) mengatakan, "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah." Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari (1) Hasil pajak daerah; (2) Hasil retribusi daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan; (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah, pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila dibandingkan dengan sumber keuangan daerah lainnya, meskipun bila dilihat dari hasil yang diperolehnya masih menunjukkan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dari pendapatan daerah yang berasal dari pembagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dikatakan menempati posisi yang paling strategis, karena dari sumber keuangan daerah yang berasal dari PAD inilah yang dapat membuat daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan didasarkan kreatifitas masing-masing daerah untuk semaksimal mungkin memperoleh sumber pendapatannya sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dan selain itu secara bebas pula dapat menggunakan hasil-hasil sumber keuangan daerah dari sektor ini guna membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah yang telah menjadi tugas pokoknya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Pontianak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan penerimaan pajak daerah tahun 2007-2013 dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sedangkan data sekundernya berupa data yang diperoleh dari pihak lain serta segala informasi yang berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan teori mengenai topik penelitian. Dimana data yang digunakan adalah data laporan realisasi penerimaan pajak parkir, pendapatan asli daerah dan pajak daerah.

Teknik pengumpul data pada penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung berupa wawancara kepada Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak yang diwakilkan Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Pengembangan, dan teknik studi dokumenter berupa lembar catatan yang diperlukan dalam penelitian ini misalnya profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak struktur organisasi, serta laporan realisasi penerimaan pajak parkir Kota Pontianak tahun 2007-2013.

Melihat hasil seberapa besar kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Pontianak, penulis menggunakan rumus: Nugroho Budi Yuwono, (dalam Fitriani 2012:38)

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P_n : Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD (dalam Rupiah)

QX : Jumlah penerimaan pajak parkir (dalam Rupiah)

QY : Jumlah penerimaan PAD Kota Pontianak (dalam Rupiah)

n : tahun (periode) tertentu

Hasil perhitungan akan memperlihatkan hasil yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan terkecil dari tahun ke tahun ke tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Sistem pemungutan pajak parkir Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak dipungut dengan *System Self Assessment* Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak adalah:

- Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.

- b. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir
- c. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir
- d. Adanya diskon untuk wajib pajak parkir yang baru.
- e. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir seperti :

- a. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang lebih realistis.
- b. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir
- c. Melakukan uji petik atau pemeriksaan kepada wajib pajak parkir
- d. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak parkir

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diketahui tentang kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif. Berikut ini adalah data mengenai realisasi penerimaan pajak parkir dan PAD Kota Pontianak:

Tabel 2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir dan PAD Kota Pontianak
Tahun 2007 - 2013

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan PAD
2007	Rp. 524.572.950,00	Rp. 57.873.969.632,17
2008	Rp. 726.899.180,00	Rp. 64.207.342.982,53
2009	Rp. 705.050.740,00	Rp. 65.847.727.764,00
2010	Rp. 1.023.765.490,00	Rp. 87.368.133.213,70
2011	Rp. 1.283.287.000,00	Rp. 151.139.421.278,94
2012	Rp. 1.677.092.788,00	Rp. 208.628.660.840,82
2013	Rp. 1.826.608.122,00	Rp. 265.271.762.000,00
		(Dalam Proses)

Sumber: *Data Olahan 2014*

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus kontribusi pajak didapat hasil persentase yang berfluktuasi setiap tahunnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Kontribusi Pajak Parkir Pada PAD Kota Pontianak
Tahun 2007-2013

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi PAD	0,9 %	1,13 %	1,07 %	1,17 %	0,849 %	0,803 %	0,688 %

Sumber: *Data Olahan 2014*

Pembahasan hasil penelitian

Sistem pemungutan pajak parkir Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Pajak parkir dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah (SKPD-PPD). Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak adalah:

- a. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
- b. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir
- c. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.
- d. Belum adanya peraturan yang memuat tentang sanksi pelanggaran pajak.
- e. Adanya pemberian diskon untuk wajib pajak parkir yang baru.
- f. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan PAD, maka diperlukan adanya usaha dan upaya dinas terkait dalam mengatasi kendala yang dialami tersebut.

Untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam penerimaan pajak parkir, Dispenda Kota Pontianak melakukan berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak parkir ini. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir seperti :

- a. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang lebih realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
- b. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan cara :
 - (1) Mengidentifikasi wajib pajak baru yang mempunyai potensi untuk dijadikan wajib pajak parkir. Mengidentifikasi pembayar pajak yang baru maupun jumlah pembayar yang ada
 - (2) Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, mulai pemutahiran data lapangan,
 - (3) Menghitung kapasitas penerimaan untuk menentukan target pajak yang realistis.

- c. Melakukan uji petik atau pemeriksaan kepada wajib pajak parkir. Dalam hal ini memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau kantor terhadap wajib pajak.
- d. Mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari pajak parkir.
- e. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak parkir agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Hasil persentase pendapatan didapat dari perhitungan penerimaan pajak parkir dibagi penerimaan PAD dikalikan dengan 100% (seratus persen), dapat dilihat perhitungan dari tahun 2007-2013. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2007 kontribusi pajak parkir terhadap PAD sebesar 0,9% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp.524.572.950,00
- b. Pada tahun 2008 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2007 yaitu dari Rp. 524.572.950,00 menjadi Rp. 726.899.180,00 sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD lebih besar dari tahun 2007 dan meningkat sebesar 1,13%. Yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 726.899.180,00.
- c. Pada tahun 2009 penerimaan pajak parkir menurun dari tahun 2008 yaitu dari Rp. 726.899.180,00 menjadi Rp. 705.050.740,00 sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD menurun dan lebih kecil dari tahun 2008 menjadi 1,07% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 705.050.740,00.
- d. Pada tahun 2010 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2009 yaitu dari Rp. 705.050.740,00 menjadi Rp. 1.023.765.490,00 sehingga menyebabkan kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga meningkat menjadi 1,17% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.023.765.490,00.
- e. Pada tahun 2011 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2010 yaitu dari Rp.1.023.765.490,00 menjadi Rp.1.283.287.000,00. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD lebih kecil dari tahun 2010 menjadi 0,849 % yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.283.287.000,00.
- f. Pada tahun 2012 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2011 yaitu dari Rp. 1.283.287.000,00 menjadi Rp. 1.677.092.788,00. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD lebih kecil dari tahun 2011 menjadi 0,803% yang diperoleh dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.677.092.788,00.
- g. Pada tahun 2013 penerimaan pajak parkir meningkat dari tahun 2012 yaitu dari Rp. 1.677.092.788,00 menjadi Rp. 1.826.608.122,00. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD jauh lebih kecil dari tahun 2012 yakni hanya sebesar 0,688% dari penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.826.608.122,00. Hal ini terjadi karena data total penerimaan PAD tahun 2013 masih dalam proses.

Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD Kota Pontianak yang paling tinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,17%, sedangkan yang paling terendah adalah pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 0,688%, hal ini karena data

PAD yang diperoleh masih dalam proses. Namun dilihat dari nilai nominalnya penerimaan pajak parkir serta kontribusinya pada PAD sudah cukup baik dan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa (1) Sistem pemungutan pajak parkir Kota Pontianak menggunakan *System Self Assessment* dimana wajib pajak disini menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutanganya kepada SKPD-PPD. (2) Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir karena adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya lahan parkir, pemberian diskon kepada wajib pajak baru dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. (3) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan memeriksa target, potensi dan realisasi penerimaan, memperluas basis penerimaan pajak, melakukan uji petik atau pemeriksaan di lapangan atau di kantor serta melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak parkir. Dengan upaya yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir. (4) Penerimaan pajak parkir dan PAD dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hanya pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum optimal, karena setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak parkir, namun dilihat dari jumlah penerimaannya selalu mengalami peningkatan. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD pada tahun 2007 sebesar 0,9%, tahun 2008 sebesar 1,13%, tahun 2009 sebesar 1,07%, tahun 2010 sebesar 1,17%, tahun 2011 sebesar 0,849%, tahun 2012 sebesar 0,803%, dan tahun 2013 hanya sebesar 0,638%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,17% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,638%. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh masih dalam proses.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Hendaknya lebih sering lagi melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak agar terjalin koordinasi yang baik. (2) Untuk menindak lanjuti masalah pelanggaran pajak, perlu adanya peraturan yang memuat tentang sanksi pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya. (3) Perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak baru guna memaksimalkan pendapatan dari sumber pajak yang sudah ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad. Yani. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fitriani (2012). *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan PAD Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Pontianak*. (Skripsi) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Hadari Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, Faisal Akbar. (2009). *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Panca, Kurniawan dan Agus Purwanto. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 *Tentang Pajak Parkir*. Pontianak.
- Siahaan, Marihot. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subana, M dan Sudrajat. (2001). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2006). *Himpunan Peraturan Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah 2006*. Bandung: Fokusmedia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta
www.kalbarprov.go.id